Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume. 2 Nomor. 3 Mei 2025
e-ISSN : 3046-983X, p-ISSN : 3046-9015, Hal. 157-169
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1743
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Hubungan Antara Strategi Pembangunan Ekonomi dan Keseimbangan Makroekonomi di Indonesia

Muhammad Roykhannul Arif[1*], Isabela Tania[2], Kiswatul Janah[3], Riyanti Wahyuni [4], Gama Pratama[5]
[1-5]Program Studi Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, UI Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia
[*]*Penulis korespondensi: roykhanarif80@gmail.com[1]*

Abstract. *Economic development strategies play a crucial role in achieving sustainable growth through increased national productivity and equitable welfare distribution. The stability of macroeconomic indicators such as inflation, exchange rates, and gross domestic product growth reflects the effectiveness of government development policies. This study aims to analyze the relationship between economic development strategies and macroeconomic equilibrium in Indonesia by examining the interconnection between the product market and the money market. The research adopts a qualitative approach using literature studies derived from scholarly journals, academic articles, and economic publications obtained from Google Scholar and other credible sources. The findings indicate that maintaining balance between the product market and the money market contributes significantly to national economic stability. A well-coordinated synergy between fiscal and monetary policies is essential to preserve macroeconomic stability and ensure that economic development progresses inclusively and sustainably amid global challenges.*

Keyword: *Development; Economic; Macroeconomic Balance; Money Market; Product Market*

Abstrak. Strategi pembangunan ekonomi berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kestabilan indikator makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, serta pertumbuhan produk domestik bruto menjadi ukuran efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara strategi pembangunan ekonomi dan keseimbangan makroekonomi di Indonesia dengan meninjau keterkaitan antara pasar produk dan pasar uang. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel akademik, serta publikasi ekonomi yang diakses melalui Google Scholar dan sumber resmi lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa keseimbangan antara pasar produk dan pasar uang berperan besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas makro dan memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara inklusif serta berkelanjutan di tengah tantangan global.

Kata Kunci*:* Ekonomi; Keseimbangan Makro; Pasar Produk; Pasar Uang; Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kebijakan dan upaya strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan ekonomi, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan (Ningsih, 2025). Di Indonesia, strategi pembangunan tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan kuantitatif, melainkan juga kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan mencakup penguatan sektor industri, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta akselerasi transformasi digital sebagai sumber produktivitas baru. Kerangka kebijakan nasional yang memuat prioritas-prioritas tersebut menjadi acuan utama dalam perumusan program-program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Dokumen-dokumen kebijakan fiskal negara, misalnya, menegaskan

Naskah Masuk: 28 September 2025; Revisi: 26 Oktober 2025; Diterima: 26 November 2025;
Terbit: 28 November 2025

pentingnya alokasi anggaran yang produktif sebagai basis untuk mendukung agenda tersebut (Arifira, Sitorus, Astuti, & Raya, 2025).

Dampak strategi pembangunan terhadap perekonomian tidak terjadi sendiri, hasil-hasil kebijakan pembangunan selalu berinteraksi dengan variabel-variabel makroekonomi yang lebih luas. Indikator seperti laju inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan Produk Domestik Bruto, serta neraca transaksi berjalan merupakan tolok ukur keseimbangan makro yang mencerminkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pembangunan. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan yang ekspansif tanpa pengelolaan fiskal dan moneter yang tepat dapat menimbulkan tekanan harga, defisit fiskal, atau distorsi pada aliran modal (Gulo, Raya Rich Fanotona, 2024).

Peran saluran pasar khususnya pasar produk dan pasar uang menjadi penting dalam memahami mekanisme pengaruh strategi pembangunan terhadap keseimbangan makroekonomi (Putri, Zahra, Nur, Deby, & Luthfi, 2024). Pasar produk menggambarkan kemampuan sektor riil menyerap investasi dan tenaga kerja, sementara pasar uang memfasilitasi alokasi likuiditas, pembiayaan investasi, dan penentuan biaya modal. Ketika pasar produk tumbuh sehat, permintaan agregat didukung oleh kapasitas produksi. sebaliknya, disfungsi pada pasar uang (misalnya likuiditas sempit atau volatilitas suku bunga) dapat menahan pembiayaan investasi dan memperlambat transmisi kebijakan pembangunan ke sektor riil (Fadilah, Pernata, & Albahi, 2024). Oleh karena itu, analisis yang memadukan perspektif kedua pasar ini penting untuk menangkap hubungan kausal dan simultan antara strategi pembangunan dan outcome makroekonomi.

Di tengah kondisi ekonomi global yang rentan dengan fluktuasi harga komoditas dan perubahan pola perdagangan internasional tantangan koordinasi kebijakan menjadi semakin nyata. Potensi konflik antara kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang harus menjaga stabilitas harga tanpa koordinasi, kedua otoritas berisiko saling mengurangi efektifitas kebijakan masing-masing. Oleh sebab itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi tema sentral dalam upaya mempertahankan keseimbangan makro sekaligus mewujudkan target pembangunan jangka menengah. Koordinasi ini mencakup kesepakatan prioritas anggaran, penggunaan instrumen pembiayaan publik yang bijak, serta kebijakan moneter yang responsif terhadap kondisi likuiditas dan eksposur eksternal (E, 2024).

Berdasarkan kondisionalitas tersebut, penelitian dan kajian yang berfokus pada "Hubungan Antara Strategi Pembangunan Ekonomi Dan Keseimbangan Makroekonomi Di Indonesia" Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis mengenai bagaimana instrumen pembangunan

diterjemahkan menjadi outcome makroekonomi serta rekomendasi kebijakan yang praktis untuk memperkuat keterkaitan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud menjembatani kesenjangan antara desain strategi pembangunan dan kebutuhan pengelolaan makro yang adaptif di era ketidakpastian global.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (library research) untuk menganalisis hubungan antara strategi pembangunan ekonomi dan keseimbangan makroekonomi di Indonesia. Data yang digunakan berupa sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, serta buku-buku ekonomi yang diakses melalui Google Scholar dan sumber resmi lainnya. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) guna menelaah keterkaitan antara strategi pembangunan ekonomi, dinamika pasar produk, dan pasar uang dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai literatur yang relevan agar hasil kajian memiliki keandalan yang tinggi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam terhadap fenomena ekonomi yang kompleks serta menggambarkan bagaimana sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter berperan dalam menjaga keseimbangan makroekonomi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pembangunan Ekonomi

Strategi pembangunan ekonomi merupakan fondasi utama dalam mengarahkan proses transformasi struktural suatu negara menuju kondisi yang lebih produktif, stabil, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga sebagai proses penciptaan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Seiring dengan perkembangan sosial dan teknologi, orientasi pembangunan mengalami pergeseran dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi menuju peningkatan kualitas pertumbuhan itu sendiri (Mahadiansar, Khairul Ikhsan, 2020). Perubahan orientasi tersebut tercermin dari kebijakan pemerintah yang menekankan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang berbasis transformasi ekonomi, inovasi, serta penguatan kapasitas institusi pembangunan. Kemampuan negara dalam merumuskan strategi pembangunan yang integral menjadi faktor penentu keberhasilan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat secara merata (Rinaldi, Erfit, & Rosmeli, 2022).

Keterpaduan antara tujuan pembangunan jangka panjang dengan kebijakan fiskal dan moneter menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi strategi pembangunan. Dalam banyak literatur ekonomi, dijelaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh stabilitas makroekonomi yang tercermin dari inflasi yang terjaga, nilai tukar yang stabil, serta pertumbuhan PDB yang berkesinambungan. Ketika pemerintah merumuskan strategi pembangunan yang ekspansif tanpa memperhatikan keseimbangan makro, tekanan terhadap inflasi, beban fiskal, dan defisit transaksi berjalan dapat muncul dan berpotensi mengganggu proses pembangunan. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menempatkan disiplin fiskal, sinkronisasi kebijakan moneter, serta manajemen belanja publik yang efisien sebagai landasan utama dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang terarah (Arkaan & Yulianto, 2025).

Pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya membutuhkan penguatan sektor riil sebagai penggerak utama pertumbuhan. Sektor ini memiliki peranan besar karena mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian. Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas melalui modernisasi teknologi industri, pelaksanaan hilirisasi komoditas, serta pengembangan industri berbasis inovasi guna memperkuat daya saing nasional. Langkah tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memperbesar kontribusi sektor industri terhadap PDB, tetapi juga untuk membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh sehingga Indonesia tidak lagi terlalu bertumpu pada komoditas primer. Penguatan sektor riil melalui industrialisasi dan hilirisasi turut memberi dorongan terhadap stabilitas ekonomi dan membantu meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi tekanan dari luar (Abubakar & Handayani, 2024).

Sebagai bagian dari strategi pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Erdkhadifa, 2022). Bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia menjadi peluang strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional apabila ditopang oleh pendidikan berkualitas, kompetensi teknis, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan vokasional, sertifikasi kompetensi, serta penguatan literasi digital. Upaya ini diyakini mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif, sehingga memperbesar kapasitas negara dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (Nursari1 & Pratama, 2025). Peningkatan kualitas SDM memiliki hubungan erat dengan performa pembangunan nasional, terutama dalam konteks ekonomi digital yang menuntut adaptasi cepat dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan ekonomi juga memberi perhatian besar pada penguatan infrastruktur fisik dan digital sebagai fondasi utama pertumbuhan berkelanjutan. Infrastruktur yang tertata dengan baik mampu menurunkan biaya logistik, mempercepat arus barang dan jasa, serta meningkatkan keterhubungan antarwilayah sehingga integrasi pasar domestik dapat berjalan lebih optimal. Pada era digital seperti sekarang, pembangunan jaringan telekomunikasi, pusat data, serta berbagai sistem digital nasional tidak hanya mendorong kemajuan teknologi informasi, tetapi juga memperluas peluang bagi lahirnya model bisnis baru, peningkatan inklusi keuangan, dan percepatan proses transformasi ekonomi di berbagai sektor. Sinergi antara infrastruktur fisik yang kuat dan infrastruktur digital yang modern memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan produktivitas nasional, memperbaiki efisiensi distribusi, dan mendorong pemerataan akses ekonomi di seluruh wilayah Indonesia (Rodzi, 2023).

Strategi pembangunan ekonomi Indonesia pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut pemerintah untuk tidak hanya memprioritaskan peningkatan output ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek sosial dalam setiap kebijakan pembangunan. Hal ini selaras dengan agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pentingnya inklusivitas, efisiensi, serta keberlanjutan sumber daya.

Kondisi Keseimbangan Makroekonomi

Kondisi keseimbangan makroekonomi Indonesia perlu dipahami sebagai hasil hubungan yang terus bergerak antara sejumlah variabel penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan posisi sektor eksternal. Semua variabel tersebut secara bersama-sama membentuk ruang fiskal pemerintah dan menentukan sejauh mana strategi pembangunan dapat dijalankan secara efektif. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kestabilan harga. Ketika inflasi berada di luar kendali, kenaikan harga akan menggerus daya beli masyarakat dan mengurangi manfaat pertumbuhan itu sendiri (Salim, 2021).

Nilai tukar rupiah merupakan saluran penting yang menghubungkan ekonomi domestik dengan dinamika global. Perubahan kurs berpengaruh langsung terhadap harga impor, potensi inflasi impor, serta daya saing ekspor. Depresiasi rupiah biasanya meningkatkan biaya impor dan menekan margin pelaku usaha, sementara apresiasi yang terlalu tajam dapat membuat produk ekspor kehilangan daya saing. Peran kombinasi faktor seperti tingkat suku bunga domestik, arus modal portofolio, serta performa ekspor. Karena itu, pengelolaan nilai tukar

yang berhati-hati dan kecukupan cadangan devisa menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas makro (Saputri, Hasmidyani, Berliani, Gustini, & Ogan, 2025).

Neraca transaksi berjalan dan kondisi eksternal juga merupakan cerminan penting dari kesehatan makroekonomi Indonesia, terutama ketika pembangunan mendorong peningkatan investasi dan impor barang modal. Defisit transaksi berjalan yang berlangsung lama tanpa diimbangi investasi produktif dapat meningkatkan kerentanan terhadap perubahan kondisi global, terutama risiko keluarnya arus modal dan tekanan terhadap nilai tukar. Setelah pandemi, pemulihan permintaan dalam negeri mendorong naiknya impor konsumsi dan investasi sehingga dibutuhkan strategi perdagangan dan industrialisasi yang mampu memperkuat nilai tambah ekspor. Sinergi antara kebijakan industri, promosi ekspor, dan kebijakan makro yang menjaga pembiayaan eksternal menjadi syarat mutlak bagi terciptanya keseimbangan jangka menengah (Petrus Peleng Roreng, Halik, & Irdawati, 2024).

Pasar produk dan kapasitas sektor riil menjadi penentu apakah ekspansi permintaan yang direncanakan oleh strategi pembangunan akan dapat diserap tanpa memicu tekanan harga. Peningkatan kapasitas produksi, efisiensi rantai pasok, dan kemampuan substitusi impor melalui hilirisasi berkontribusi pada stabilitas harga dan ketahanan ekonomi. Pentingnya penguatan sektor riil, termasuk UMKM dan sektor manufaktur, sebagai basis penyerap tenaga kerja dan penghasil nilai tambah yang stabil. Apabila kapasitas penawaran dapat menyesuaikan dengan peningkatan permintaan, tekanan inflasi akibat kebijakan fiskal ekspansif dapat diminimalkan, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan stabilitas makro.

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas makro sekaligus mendukung agenda pembangunan. Pengalaman kebijakan menunjukkan bahwa ekspansi fiskal yang tidak diimbangi kebijakan moneter yang tepat dapat mempercepat inflasi dan menimbulkan tekanan eksternal. Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu ketat ketika pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk mempercepat pemulihan dapat menyebabkan perlambatan ekonomi. Di Indonesia, kerja sama institusional antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan KSSK menjadi mekanisme untuk menyelaraskan kebutuhan pertumbuhan dan stabilitas (Wati & Amalia, 2025). Pasar uang dan pasar keuangan juga berperan besar dalam menyediakan pembiayaan bagi pembangunan, terutama proyek infrastruktur dan ekspansi sektor riil. Dalam kondisi likuiditas yang ketat atau ketika spread kredit melebar, transmisi kebijakan moneter menjadi kurang efektif dan menyebabkan perlambatan investasi (Araminta, 2023).

Interaksi Pasar Produk dan Pasar Uang

Pasar produk dan pasar uang merupakan dua pilar fundamental dalam analisis makroekonomi karena keduanya mencerminkan bagaimana permintaan barang serta likuiditas moneter saling berinteraksi dalam perekonomian. Dalam model klasik Keynesian, kurva IS (Investment-Saving) merepresentasikan keseimbangan di pasar barang, yaitu titik di mana permintaan agregat sama dengan penawaran agregat dalam jangka waktu tertentu. Kurva LM (Liquidity preference-Money supply) merefleksikan titik di mana permintaan uang dan penawaran uang seimbang pada tingkat suku bunga tertentu. Dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia, titik perpotongan IS dan LM menjadi sangat strategis karena menunjukkan kombinasi pendapatan nasional (Y) dan suku bunga (r) yang menopang stabilitas makro di tengah kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pembangunan (Sirait, Fitri, & Harahap, 2023).

Jika strategi pembangunan ekonomi mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi publik besar, permintaan barang secara agregat akan meningkat. Kenaikan ini memindahkan kurva IS ke kanan, artinya pada suku bunga tertentu, pendapatan nasional naik karena ekspansi permintaan. Namun, agar kenaikan output tidak disertai lonjakan inflasi yang merusak daya beli masyarakat, diperlukan pergeseran kurva LM. Pergeseran LM ke kanan dapat terjadi apabila Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar atau memangkas suku bunga, sehingga likuiditas mumpuni untuk menyerap ekspansi permintaan tersebut. Sebuah penelitian empiris di Indonesia membuktikan bahwa model IS-LM masih relevan untuk menjelaskan interaksi antara variabel makro dan kebijakan ekonominya; dalam penelitian tersebut, analisis menunjukkan bahwa keseimbangan terjadi pada tingkat pendapatan dan suku bunga yang sesuai dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tertentu (Putri et al., 2024).

Dalam praktik pasar uang Indonesia, kurva LM sangat dipengaruhi oleh faktor seperti ekspektasi inflasi, jumlah uang beredar dan kebijakan moneter jangka pendek. Ketika ekspektasi inflasi naik, permintaan uang untuk transaksi dan sebagai lindung nilai meningkat, yang bisa bergeser LM ke kiri jika penawaran uang tidak diimbangi. Sebaliknya, ketika Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter dengan menurunkan suku bunga atau meningkatkan likuiditas, LM dapat bergeser ke kanan, memungkinkan tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi tanpa menekan bunga ke titik yang sangat rendah. Kondisi likuiditas dan kebijakan moneter sangat menentukan intercept LM dan memberikan dampak besar pada kemampuan ekonomi nasional untuk tumbuh dalam kerangka pembangunan yang ambisius (Kukuh Kananda Rizky, Bagus Saputra, Fauzan Ponco Nugroho, 2024).

Tantangan muncul ketika kurva IS dan LM tidak bergeser secara sinkron. Misalnya, ekspansi fiskal melalui belanja pemerintah yang agresif dapat mendorong IS ke kanan, tetapi

jika LM tidak bergeser karena likuiditas terbatas atau suku bunga tinggi, maka peningkatan permintaan agregat bisa menimbulkan tekanan inflasi dan suku bunga naik, yang justru menahan investasi swasta. Dalam kondisi seperti ini, strategi pembangunan bisa gagal mengangkat pendapatan nasional secara signifikan karena beban moneter menghambat ekspansi sektor riil. Untuk menjaga stabilitas, perlu ada penyeimbangan yang hati-hati antara kebijakan fiskal ekspansif dan dukungan moneter yang proaktif agar titik keseimbangan (IS = LM) tetap berada di level yang optimal bagi pertumbuhan jangka panjang.

Interaksi antara pasar produk dan pasar uang juga dipengaruhi oleh ekspektasi pelaku ekonomi. Investor dan konsumen akan mempertimbangkan bagaimana kebijakan moneter akan berubah di masa mendatang ketika mereka merencanakan konsumsi, investasi, atau tabungan. Apabila pasar uang diharapkan tetap longgar (suku bunga rendah), maka investasi cenderung meningkat dan permintaan barang akan naik, memperkuat pergeseran IS. Sebaliknya, jika ekspektasi suku bunga naik, investor bisa menahan investasinya meski ada dorongan fiskal, karena peningkatan bunga akan menaikkan biaya modal (Fadilah et al., 2024). Dinamika ekspektasi ini sangat relevan di era pembangunan Indonesia saat ini, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur besar di mana skala investasi memerlukan perencanaan jangka panjang dan sensitivitas terhadap suku bunga.

Dalam konteks perekonomian terbuka seperti Indonesia, elemen nilai tukar dan arus modal turut memengaruhi titik IS-LM. Arus modal masuk, misalnya, dapat menambah likuiditas melalui pasar keuangan, yang mendorong LM ke kanan dan memperkuat posisi IS-LM. Sebaliknya, arus keluar modal atau depresiasi mata uang bisa memperketat likuiditas dan menekan LM, yang jika tidak diimbangi oleh penyesuaian IS dapat menciptakan ketegangan makro seperti defisit external atau stagnasi output. Dalam merancang strategi pembangunan, otoritas moneter dan fiskal tidak bisa mengabaikan faktor eksternal karena interaksi pasar uang dan barang dalam model IS-LM menjadi lebih kompleks bila dimasukkan variabel terbuka.

Pasar produk dan uang melalui kerangka IS-LM menawarkan panduan kuantitatif dan konseptual bagi perumus kebijakan pembangunan. Dengan menerapkan model ini, pemerintah dapat memetakan skenario di mana belanja publik dapat ditingkatkan tanpa memicu inflasi berlebihan, atau kapan melonggarkan moneter tanpa menimbulkan tekanan pasar uang yang destabilizing. Selain itu, pemahaman IS-LM juga membantu dalam merancang skema sinergi jangka panjang antara kebijakan pembangunan dan stabilitas makro, terutama dalam konteks pertumbuhan yang inklusif, titik keseimbangan IS-LM yang tepat memungkinkan pertumbuhan yang lebih merata, dengan investasi produktif, konsumsi yang sehat, dan likuiditas yang cukup untuk menopang ekspansi ekonomi.

Kebijakan Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal menjadi instrumen utama yang dapat digunakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan makroekonomi melalui pengaturan pajak, pengeluaran publik, dan distribusi pendapatan (Srimaryani, 2023). Pajak konsumsi dan pengeluaran publik yang tepat dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya serta mengelola beban utang publik, sehingga memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengurangan volatilitas demografis, serta akselerasi kemajuan teknologi dan akumulasi modal (Yurahman & Satria, 2025).

Selain kebijakan fiskal, peran pemerintah secara langsung dalam stabilisasi ekonomi juga terbukti efektif. Pemerintah berperan dalam mengendalikan inflasi, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau melalui kebijakan struktural dan koordinasi lintas sektor. Strategi ini dilaksanakan melalui kebijakan fiskal, moneter, serta penguatan sektor riil, termasuk operasi pasar pangan, subsidi logistik, dan partisipasi aktif dalam forum internasional seperti G20 untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global (Mawar, 2023). Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter merupakan fondasi penting bagi stabilitas makroekonomi. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan bank sentral, kombinasi kebijakan ekspansif dan kontraktif diterapkan secara bergantian sesuai dengan dinamika ekonomi nasional ekspansif untuk mendorong pertumbuhan saat resesi, dan kontraktif untuk mengendalikan inflasi saat ekonomi memanas (Zulaikah, 2024).

Kebijakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah sistem yang kompleks dan multidimensi. Upaya stabilisasi tidak dapat hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan semata, melainkan harus dijalankan melalui sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan struktural yang diterapkan pemerintah dalam konteks domestik maupun internasional. Dalam tataran ekonomi makro, keseimbangan antara kebijakan tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang strategis. Pajak berfungsi bukan hanya sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur distribusi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pajak yang progresif dapat menekan ketimpangan ekonomi, meningkatkan daya beli kelompok berpendapatan rendah, serta menumbuhkan konsumsi domestik sebagai pendorong utama

pertumbuhan ekonomi. Srimaryani menekankan bahwa pajak konsumsi dan pengeluaran publik yang dirancang dengan tepat mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya nasional dan meminimalisasi beban utang publik, yang pada akhirnya memperkuat fondasi stabilitas fiskal negara (Srimaryani, 2023). Dengan demikian, kebijakan fiskal yang efektif tidak hanya bertujuan mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga memastikan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Kebijakan fiskal yang ekspansif dalam konteks ini memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai *stabilisator otomatis* (automatic stabilizer), belanja pemerintah meningkat ketika ekonomi melambat untuk mendorong permintaan agregat. Kedua, sebagai *instrumen stimulus*, kebijakan fiskal yang ekspansif mampu menggerakkan sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur, pertanian, dan infrastruktur. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Yurahman dan Satria, ekspansi fiskal harus diiringi dengan pengelolaan defisit yang hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal jangka panjang. Efisiensi belanja negara, akurasi penyaluran anggaran, dan kualitas institusi fiskal menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar memberikan multiplier effect yang optimal bagi perekonomian.

Pemerintah juga berperan dalam mendorong transformasi ekonomi hijau dan digitalisasi untuk mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang. Program transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan yang dijalankan melalui kerja sama bilateral, seperti dengan Korea Selatan pada sektor energi bersih dan kendaraan listrik, merupakan langkah strategis menuju stabilitas ekonomi masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilisasi ekonomi tidak hanya berarti menjaga angka inflasi dan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan ketahanan struktural terhadap krisis lingkungan, geopolitik, maupun digitalisasi global yang cepat.

Selain faktor kebijakan, efektivitas stabilisasi ekonomi juga sangat bergantung pada faktor kelembagaan dan kualitas tata kelola ekonomi. Kualitas institusi fiskal yang baik memastikan transparansi anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya publik, sedangkan independensi bank sentral menjamin stabilitas moneter yang berkelanjutan tanpa tekanan politik jangka pendek. Penguatan data ekonomi, sistem statistik, dan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menjadi komponen yang menentukan ketepatan arah kebijakan ekonomi.

Upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi harus bersifat adaptif, terukur, dan terkoordinasi lintas sektor. Ketepatan waktu implementasi kebijakan, konsistensi antarperiode pemerintahan, serta kolaborasi antara fiskal dan moneter menjadi penentu utama keberhasilan stabilisasi ekonomi. Tantangan global seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta

disrupsi teknologi menuntut kebijakan ekonomi yang fleksibel namun tetap berpihak pada prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah menunjukkan kapasitas yang cukup kuat dalam menghadapi tantangan tersebut melalui kebijakan makroekonomi yang disiplin, koordinatif, dan inklusif.

4. KESIMPULAN

Hubungan antara strategi pembangunan ekonomi dan keseimbangan makroekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut saling terikat dalam proses yang dinamis serta memerlukan pengelolaan kebijakan yang terpadu. Berbagai upaya pembangunan yang ditempuh pemerintah mulai dari penguatan sektor riil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan infrastruktur fisik dan digital, hingga transformasi struktur industry tidak dapat berjalan optimal tanpa kestabilan variabel makro yang memadai. Stabilitas inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan keseimbangan eksternal menjadi prasyarat penting agar strategi pembangunan mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kinerja makroekonomi Indonesia terbukti sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar produk dan pasar uang. Ketika sektor riil memiliki kapasitas yang cukup untuk merespons peningkatan permintaan hasil kebijakan fiskal, tekanan harga dapat ditekan dan pertumbuhan tetap terjaga. Namun, kemampuan tersebut bergantung pada kondisi likuiditas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Model IS-LM menunjukkan bagaimana titik keseimbangan pendapatan nasional dan suku bunga tercapai ketika kebijakan fiskal dan moneter bergerak secara seirama. Ketidaksinkronan kedua kebijakan dapat menimbulkan tekanan inflasi, menahan investasi, serta menciptakan ketidakpastian yang pada akhirnya melemahkan tujuan pembangunan.

Dinamika global turut mempertegas pentingnya koordinasi antarsektor kebijakan. Fluktuasi komoditas internasional, perubahan aliran modal, serta volatilitas nilai tukar menjadikan sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia semakin krusial. Kerja sama dalam menjaga ruang fiskal, mengelola pembiayaan publik, serta mempertahankan stabilitas moneter menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pembangunan jangka panjang. Kebijakan stabilisasi yang adaptif, terutama melalui penguatan sektor eksternal dan peningkatan ketahanan industri nasional, berperan besar dalam menjaga keseimbangan makro di tengah tantangan global.

Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau luasnya program pembangunan yang dijalankan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengelola interaksi kompleks antara pasar produk, pasar uang, dan kebijakan

makro. Sinergi fiskal–moneter menjadi kunci agar pembangunan dapat berlangsung secara terarah, stabil, dan mampu memberikan kesejahteraan yang merata. Dalam konteks ekonomi modern yang penuh ketidakpastian, keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada ketepatan pengelolaan makro serta kesiapan institusi nasional dalam menyesuaikan kebijakan terhadap perubahan lingkungan ekonomi, baik domestik maupun internasional. Dengan pendekatan yang konsisten dan koordinatif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pembangunan yang berkualitas dan tangguh dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, L., & Handayani, T. (2024). Kebijakan integratif dalam transformasi industri kecil. *Jurnal*, 53(November), 227–236.

Araminta, M. A. (2023). Pengaruh transmisi kebijakan moneter dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal*, 3, 70–81.

Arifira, G., Sitorus, T., Astuti, Y., & Raya, U. P. (2025). Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong perekonomian lokal. *Jurnal*, 9(6), 280–286.

Arkaan, A. B., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi: Review of fiscal policy and economic growth. *Jurnal*, 4196–4207.

E, M. S. P. (2024). Evaluasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal*, (3).

Erdkhadifa, R. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan pendekatan spatial regression. *Jurnal*, 11(2), 122–140.

Fadilah, K., Pernata, L., & Albahi, M. (2024). Analisis konseptual pasar uang, pasar barang, dan keseimbangan pasar. *Jurnal*, 2(12), 288–293.

Gulo, R. R. F., & B. E. (2024). *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(September), 48–56.

Kukuh Kananda Rizky, Bagus Saputra, & Fauzan Ponco Nugroho, S. (2024). Interaksi pasar uang dan pasar barang: Analisis dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal*, 4(2), 194–205.

Mahadiansar, Khairul Ikhsan, I. G. E. P. S. S., & A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional di Indonesia. *Jurnal*, 17(1), 77–92.

Mawar, Y. A. R. A. A. N. A. D. D. S. (2023). Peranan pemerintah dalam stabilisasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(5), 621–626.

Ningsih, R. (2025). Analisis determinan pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal*, 1(1), 18–25.

Nursari, A., & Pratama, A. D. (2025). Middle income trap di Indonesia: Peran dan tantangan sektor ekonomi dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. *Jurnal*, 196–213.

Petrus Peleng Roreng, J. B., Halik, M. Y., & Irdawati. (2024). Systematic literature review: Kondisi makroekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 dan prospek di masa mendatang. *Jurnal*, 2(2). http://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.306

Putri, K., Zahra, A., Nur, S., Deby, R., & Luthfi, P. M. (2024). Analisis pasar uang dan pasar barang di Indonesia dengan pertimbangan kebijakan fiskal. *Jurnal*, 1(2), 807–815.

Rinaldi, N., Erfit, E., & Rosmeli, R. (2022). Transformasi struktural perekonomian Indonesia. *Jurnal*, 117–126.

Rodzi, M. F. (2023). Pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di Indonesia. *Jurnal*, 3(2), 151–163.

Salim, A. (2021). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal*, 7, 17–28.

Saputri, W., Hasmidyani, D., Berliani, L. E., Gustini, R., & Ogan. (2025). Pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal*.

Sirait, F. Y., Fitri, M., & Harahap, I. (2023). Markets equilibrium: The IS-LM model. *Jurnal*, 8(30), 1096–1105.

Srimaryani. (2023). Stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal: Studi literatur terkait dampak pajak terhadap pendapatan dan konsumsi; kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan; efektivitas kebijakan fiskal. *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*, 9(3), 95–108. http://doi.org/10.2961/bise.v9i2.7

Wati, E., & Amalia, P. (2025). Analisis kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. *Jurnal*, 1(3), 91–101.

Yurahman, D., & Satria, D. (2025). Dampak stabilitas ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 2(1), 205–212.

Zulaikah. (2024). Peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 91–109.